

## **HARSJA BACHTIAR DAN PEMBENTUKAN BANGSA INDONESIA - TEORI DAN HISTORIOGRAFI -**

**Heddy Shri Ahimsa-Putra**

Departemen Antropologi  
Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Gadjah Mada

Pembangunan bangsa (*nation building*) merupakan salah satu isu utama politik nasional Indonesia setelah kemerdekaan, karena “bangsa Indonesia” bukanlah sebuah satuan sosial yang telah hadir di kawasan kepulauan Nusantara sejak zaman purbakala. Bangsa dan negara Indonesia adalah dua satuan sosial-politik-budaya yang baru muncul di abad yang lalu, dan usianya belum lagi mencapai satu abad. Di abad 21 ini -dalam usianya yang mendekati tiga perempat abad- tarikan sosial-politik yang mengarah pada konflik nasional bukannya melemah, tapi seringkali menguat ketika mendekati masa pemilihan presiden dan wakil presiden, kepala daerah atau para wakil rakyat yang baru. Tidaklah mengherankan jika fenomena pembangunan bangsa tetap merupakan fenomena sosial yang masih sangat perlu diteliti dan dipahami prosesnya dengan baik di Indonesia. Topik ini merupakan salah satu topik utama ilmu-ilmu sosial Indonesia di tahun 1960an hingga tahun 1990an.

Salah seorang ilmuwan sosial Indonesia yang menaruh perhatian terhadap masalah tersebut adalah almarhum Harsja W. Bachtiar, seorang guru besar sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Beliau menulis disertasi tentang topik tersebut untuk mencapai gelar doktornya di tahun 1973, di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Meskipun sudah hampir 50 tahun, namun hasil kajian ini belum banyak dikenal para ilmuwan sosial-politik di Indonesia. Sangat jarang ia dikutip atau dirujuk oleh mereka yang meneliti masalah integrasi nasional di Indonesia. Mungkin karena ia masih berupa disertasi dalam bahasa Inggris, dan belum terbit menjadi buku dalam bahasa Indonesia. Tulisan ini memaparkan pembahasan Harsja W. Bachtiar mengenai proses “pembangunan bangsa” -lebih tepatnya proses kemunculan, kelahiran sebuah bangsa baru-, bangsa Indonesia dalam disertasi tersebut.

### **1. SIAPA HARSJA W. BACHTIAR ?**

Harsja W. Bachtiar lahir di Bandung pada 3 Mei 1934. Ayahnya, Sutan Adam Bachtiar, adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Pariaman, Sumatera Barat. Pendidikan yang pernah diperoleh Harsja adalah pendidikan di *Europesche Lagere School*, SMP dan SMA di Jakarta. Jadi masa kanak-kanak dan remaja Harsja adalah masa-masa menjelang dan setelah kemerdekaan. Ketika teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Bung Karno, Harsja menginjak usia 11 tahun, usia memasuki pendidikan SMP. Hingar-bingar

politik di masa itu dan beberapa tahun sesudahnya, tentu membekas cukup kuat pada diri Harsja, yang kemudian juga berpengaruh pada pilihan pendidikannya di perguruan tinggi. Bekal pendidikan dasar gaya Eropa tampaknya telah membuka kesempatan bagi Harsja untuk mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Amsterdam pada tahun 1953-1955 guna mendapatkan gelar sarjananya. Beliau kemudian melanjutkan ke Cornell University, di Ithaca, New York, Amerika Serikat, tempat beliau mendapatkan gelar masternya, dan akhirnya kuliah di Harvard University, di Kota Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar doktornya dalam bidang sosiologi dengan disertasi berjudul *The Formation of the Indonesian Nation*<sup>1</sup>).

Tidak lama setelah kepulangannya dari studi di Amerika Serikat, beliau diangkat menjadi guru besar antropologi di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. Selain mengajar di jurusan Antropologi -yang ketika itu masih berada di Fakultas Sastra-, beliau juga mengajar di jurusan Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial (sebelum menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP). Meskipun demikian, di luar kampus beliau lebih dikenal sebagai guru besar Sosiologi. Sebagai dosen, beliau juga mengajar di SESKOAD, Bandung, di SESKOAL, Cipulir, Jakarta dan di Akademi Hukum Militer, Jakarta. Selain mengajar, beliau juga sangat aktif di LIPI bersama Prof. Koentjaraningrat, guru beliau semasa SMA di Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Sastra dan Dekan PTIK (Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian) (1980-1987). Harsja Bachtiar adalah sosok yang sangat dihormati oleh para ilmuwan sosial -senior maupun yunior- Indonesia di era 1970-1990.

Sebagai ilmuwan sosial, pendapat-pendapat beliau mengenai masyarakat dan dunia pendidikan Indonesia juga diperlukan oleh sejumlah instansi pemerintahan, sehingga beliau juga pernah dipercaya untuk menduduki jabatan Direktur Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (LEKNAS), LIPI; Koordinator Konsorsium Ilmu-ilmu Sosial dan Sastra, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Ketua Dewan Eksekutif Komite Kajian Kebudayaan Melayu; Ketua Dewan Yayasan Mandalawangi; dan Ketua Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K). Pada awal tahun 1990an di puncak karirnya, Harsja Bachtiar menderita sakit ginjal, yang kemudian membawa beliau pada akhir hayatnya pada 18 Desember 1995.

## **2. HARSJA BACHTIAR DAN PARADIGMA KAJIAN “PEMBENTUKAN BANGSA”**

Topik mengenai terbentuknya sebuah bangsa merupakan salah satu topik hangat di kalangan ilmuwan sosial Barat di tahun 1940-1960an, masa-masa kebangkitan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika untuk melepaskan diri dari penjajahan beberapa negara Eropa Barat. Kajian tentang masalah tersebut masih terus berlanjut hingga kini, dan dalam hal ini Indonesia masih tetap merupakan salah satu negara yang menarik untuk dikaji (lihat Schefold, 1998; Meuleman, 2006; Jones, 2012; Lindsay, 2012).

Sejarah Indonesia telah mengajarkan pada kita bahwa masa-masa awal kemerdekaan merupakan masa ujian yang sangat berat bagi pemerintah Indonesia. Di satu sisi pemerintah

---

1 ) Wikipedia

dan bangsa Indonesia harus berhadapan dengan pihak Belanda yang ingin berkuasa kembali di Hindia Belanda, di sisi lain harus berhadapan dengan kelompok-kelompok bangsa sendiri yang tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan politik dari pemerintah Indonesia yang baru. Pemberontakan PRRI-Permesta dan DI-TII, adalah contoh yang sangat jelas dari penolakan terhadap upaya sentralisasi kekuasaan di Jakarta serta penegakan negara Republik Indonesia di atas landasan ideologi Pancasila. Pemberontakan-pemberontakan ini merupakan ancaman terhadap kesatuan bangsa, terhadap integrasi nasional, yang saat itu sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Tanpa integrasi nasional usaha peningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak akan dapat terlaksana.

Meskipun ancaman terhadap integrasi nasional itu kini tidak lagi sekuat dulu, -berkat keberhasilan pemerintah Indonesia membangun berbagai macam sarana-prasarana perhubungan dan komunikasi, serta struktur kelembagaan yang sangat dibutuhkan untuk integrasi tersebut (Ahimsa-Putra, 2018)-, namun masalah integrasi nasional tetap perlu selalu mendapat perhatian yang serius, jika keberadaan Indonesia dalam wadah NKRI seperti yang sekarang masih diinginkan. Dalam konteks inilah studi Harsja tentang pembentukan bangsa Indonesia masih sangat terasa relevansinya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita di masa kini.

Selain penting secara sosial-politis-praktis, kajian tersebut juga penting secara akademis. Harsja melihat bahwa berbagai publikasi tentang perkembangan sosial politik di Indonesia ternyata “hanya sekenanya saja membahas bagaimana negara yang penduduknya begitu beranekaragam bisa bersatu menjadi sebuah “bangsa”, dan abai melihatnya sebagai suatu fenomena berbeda yang layak diperlakukan sebagai sebuah fenomena khusus”. Menurutnya, sudah banyak perhatian diberikan pada “struktur bangsa itu, kepada karakternya yang bergolak, tetapi tidak banyak perhatian diberikan kepada bangsa itu sendiri, yaitu kepada satuan-satuan sosial yang membentuknya”. Harsja juga melihat bahwa berbagai kajian tentang Indonesia sebagai sebuah negara baru belum memperlihatkan “analisis yang cukup tentang pembentukan bangsa Indonesia sebagai suatu fenomena yang khas – sebagai bangsa itu *sui generis*” (2019: 2) <sup>2</sup>).

Jika dinyatakan secara lebih eksplisit, maka pertanyaan Harsja adalah: bagaimana proses pembentukan bangsa Indonesia -yang terdiri dari begitu banyak suku bangsa- berlangsung atau terjadi di masa lalu? Faktor-faktor apa saja yang memainkan peran dalam proses tersebut? Bagaimana situasi dan kondisi proses pembentukan bangsa tersebut di masa kini (tahun 1960an)? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini diperlukan sejumlah konsep strategis yang dapat terhubung satu dengan yang lain sedemikian rupa membentuk sebuah kerangka pemikiran yang tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan. Dua konsep yang menurut Harsja sangat penting adalah “negara” dan “bangsa”. Negara memang seringkali disamakan dengan bangsa, namun keduanya jelas berbeda.

Ada banyak pendapat ilmuwan sosial dan politik yang dapat diikuti jika kita ingin menggunakan konsep-konsep tersebut, karena negara dan bangsa merupakan fenomena yang sudah lama menjadi topik kajian mereka. Akan tetapi Harsja memilih untuk menggunakan

---

2 ) Untuk selanjutnya, kutipan yang diambil dari draft buku ini hanya akan mencantumkan halamannya.

pandangan Max Weber dan T.H. Marshall mengenai negara, yang menurut beliau dapat saling mengisi. Weber -menurut Harsja- telah mendefinisikan negara dalam perspektif “penggunaan kekuatan fisik”, sedang Marshall lebih menekankan negara pada “sisi aktivitas sosial”nya. Oleh karena itu Weber melihat negara sebagai “satu komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli penggunaan kekuatan fisik secara sah di dalam satu wilayah teritorial tertentu guna menjaga ketertiban”. Sehubungan dengan itu, diperlukan di situ suatu “lembaga sosial yang tahu penggunaan kekerasan”. Di sinilah pandangan Marshall kemudian dianggap relevan.

Marshall (2009) mendefinisikan kewarganegaraan melalui perspektif hak hukum. Tiga unsur yang dipandang penting adalah unsur sipil, unsur politik dan unsur sosial. Unsur sipil adalah “hak yang menjamin kebebasan individu, seperti kebebasan pribadi, kebebasan berbicara, berpikir dan beragama; hak memiliki harta benda, dan untuk mengakhiri kontrak yang sah, dan hak untuk mendapatkan keadilan”. Unsur politik adalah “hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kekuasaan politik, sebagai satu anggota dari satu badan yang diberi kekuatan politik, atau sebagai pemilih anggota badan tersebut”. Unsur sosial adalah “hak atas sebarang kesejahteraan ekonomi dan rasa aman sampai kepada hak untuk ikut memiliki secara penuh warisan sosial dan hak untuk hidup sebagai seorang mahluk beradab sesuai dengan standar yang berlaku dalam masyarakat” (hal. 6-7).

Meskipun pandangan Weber dan Marshall dapat saling melengkapi, namun definisi mereka tentang negara dianggap Harsja masih kurang tajam untuk dapat digunakan menganalisis fenomena terbentuknya bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa baru. Oleh karena itu beliau kemudian mengajukan definisinya sendiri. Negara, menurut Harsja adalah “keseluruhan pola tindakan yang ditentukan oleh sekumpulan peraturan dan regulasi tertentu yang diberlakukan sebagai norma hukum, tertulis atau tidak tertulis, yang telah disahkan untuk ditegakkan di antara penduduk dalam suatu wilayah tertentu”. Negara adalah juga “sistem aktivitas yang diwujudkan oleh orang-orang yang melakukan aktivitas tersebut dalam peran mereka sebagai warga, sesuai dengan tatanan yang berlaku” (hal.7). Negara dengan demikian, berbeda dengan bangsa.

“Bangsa” menurut Harsja adalah sebuah “komunitas sosial”, yang memiliki “suatu sistem budaya tertentu yang bersifat umum, yang mendiktekan pola-pola perilaku untuk digunakan oleh para anggota dalam hubungan mereka satu sama lain”. Sistem budaya ini membedakan warga suatu bangsa dengan mereka yang bukan bagian dari bangsa tersebut (hal.7). Dengan kata lain, sistem budaya ini menjadi salah satu elemen dari identitas bangsa tersebut. Untuk menjelaskan hal ini Harsja mengambil contoh bangsa Amerika, sebagaimana dipaparkan oleh S.M. Lipset dan R.B. Dobson (1972).

Definisi-definisi Harsja tersebut sangat jelas menunjukkan pengaruh pemikiran Talcott Parsons, sebagaimana terlihat pada konsep-konsep yang terkandung di dalamnya, seperti misalnya, “pola tindakan”, “sistem aktivitas”, dan “sistem budaya”. Mengikuti pandangan Parsons juga (1968), Harsja mengatakan bahwa suatu bangsa memiliki pandangan tentang “keadaan ideal” bangsa itu sendiri, yang tercermin dalam berbagai mitos, legenda dan cerita

rakyat yang dimilikinya. Dari dunia imajiner inilah diperoleh beberapa prinsip umum yang dianggap berlaku bagi seluruh warga bangsa tersebut. Prinsip-prinsip umum ini merupakan “inti sebuah bangsa” atau “nilai kemasyarakatan yang menjadi sasaran komitmen bangsa itu” (hal. 11).

Pendapat Parsons memang membawa Harsja pada arah yang beliau inginkan, akan tetapi beliau juga merasakan adanya kekurangan di dalamnya. Nilai-nilai umum yang dikemukakan Parsons masih “terlalu umum dan tidak praktis digunakan dalam situasi kehidupan nyata”, kritik Harsja. Nilai-nilai tersebut “terlalu luas untuk diterjemahkan menjadi penggunaan praktis dalam situasi sosial tertentu, terutama untuk situasi rutin”. Guna mengatasi kesulitan ini, Harsja menyodorkan sebuah konsep lagi, yaitu “pola-pola normatif”, yang tidak lain adalah “nilai-nilai yang berasal dari nilai-nilai masyarakat yang bersama-sama dimiliki anggota bangsa itu. Pola-pola normatif ini dianggap sah karena jelas merupakan konsekuensi logis dari apa yang secara kolektif mereka anggap baik dan benar. Oleh karena itu, anggota bangsa itu secara moral wajib menyesuaikan diri dengan pola normatif tersebut dalam kegiatan bermasyarakat, yaitu “melakukan apa yang diharapkan dalam situasi tertentu” (hal. 12).

Dalam sebuah negara, sistem normatif ini tidak perlu sama dengan sistem hukum. Perbedaan ini mempertegas pemisahan antara negara dengan bangsa, karena keberadaan suatu bangsa “tidak tergantung pada hubungannya dengan satu sistem hukum tertentu”. “Tanpa sistem hukum, negara kehilangan strukturnya, dan karenanya, seluruh keberadaannya”, sementara suatu “bangsa bisa eksis tanpa norma hukum tertentu yang secara resmi diadakan untuk mengatur aneka hubungan sosial antar-anggotanya”. Sebuah sistem normatif “tidak dipertahankan dengan menggunakan kekuatan”, tetapi “dipelihara oleh rasa solidaritas antar anggotanya yang merasa berkomitmen untuk mendukungnya demi kepentingan bersama mereka” (hal. 12-13). Dengan perbedaan ini kita dapat “menerima pendapat bahwa suatu bangsa bisa tetap ada tanpa perlu dukungan struktur suatu negara. Satu bangsa mungkin ada sebelum kemudian memutuskan untuk mengambil satu struktur politik resmi dalam bentuk sebuah negara” (hal. 13).

Dengan kerangka berfikir seperti itu, Harsja mengemukakan dua tesis utama yang menjadi landasan analisisnya. Pertama adalah bahwa sistem normatif tadi “diaktualisasikan dalam aktivitas sosial konkret dalam kolektivitas”, “sesuai dengan kelompok pola-pola normatif yang dianggap dapat diterapkan dalam situasi yang sedang dihadapi” (hal.13). Kedua adalah bahwa kolektivitas sosial tertentulah yang “membentuk komponen integral suatu bangsa”. Dengan kata lain, suatu bangsa harus terdiri dari “kolektivitas yang dapat dikenali” (hal. 14).

Tentu, konsep-konsep pokok di atas belum betul-betul memadai sebagai sebuah kerangka pemikiran atau paradigma untuk memahami pembentukan bangsa Indonesia. Konsep “pembentukan” yang dibayangkan oleh Harsja menuntut adanya sebuah perspektif yang menekankan pada proses, karena “pembentukan” pada dasarnya adalah sebuah proses. Selain itu, fenomena terbentuknya bangsa Indonesia yang berasal dari ratusan etnis yang

berbeda dan tinggal di ribuan pulau yang tersebar luas di antara 95–141 Bujur Timur, 6 Lintang Utara dan 11 Lintang Selatan, merupakan sebuah fenomena sosial-budaya yang sudah seharusnya dipandang sebagai kasus “khusus” (khas). Pertanyaannya kemudian adalah: pendekatan apa yang seharusnya dipakai untuk dapat menunjukkan adanya proses yang bersifat khas, unik tersebut? Bagi Harsja tidak ada yang lebih tepat kecuali pendekatan sejarah.

Asumsi-asumsi dasar dalam paradigma historis bersama-sama dengan sejumlah konsep pokok (*key words*) di atas kemudian secara sangat sadar dan konsekwen digunakan oleh Harsja untuk memahami proses terbentuknya masyarakat di kepulauan Nusantara menjadi sebuah bangsa baru, bangsa Indonesia. Pemanfaatan perspektif sejarah membuat uraian Harsja tentang “pembentukan Bangsa Indonesia” terlihat sebagai historiografi dengan genre *historical sociology*, sosiologi historis, sosiologi yang menyejarah, atau sebagai *sociological history*, sejarah yang sosiologis.

### **3. TEORI HARSJA TENTANG “BANGSA INDONESIA”**

Jika kita simak baik-baik analisa dan paparan Harsja mengenai proses terbentuknya bangsa Indonesia, paling tidak ada tiga teori yang diajukannya, yakni: (a) mengenai pembentukannya; (b) mengenai ekspansi atau peluasannya, dan (c) mengenai masalah pembentukannya, hingga tahun 1970an.

#### **(a) Teori Harsja tentang “Pembentukan Bangsa Indonesia”**

Berlandaskan pada pandangan Weber tentang negara, Harsja berpendapat bahwa ada tiga faktor yang memainkan peran utama dalam proses terbentuknya bangsa Indonesia di masa lampau yaitu: 1) adanya pemerintah kolonial Belanda yang bertindak sebagai organ pemaksa, yang memegang monopoli kekuasaan dan kemudian menetapkan batas-batas teritorial, serta memiliki hubungan kuasa tertentu dengan satuan-satuan politik lokal di berbagai daerah; 2) munculnya cendekiawan etnis modern yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial, dan 3) terbentuknya sebuah kolektivitas supra-etnik baru, karena adanya unsur-unsur pemersatunya, yaitu agama, profesi, kesadaran nasional, serta pelebagaan sebuah bahasa nasional, bahasa Indonesia.

Memang merupakan hal yang ironis bahwa pemerintah kolonial Belanda yang menjajah masyarakat suku-suku di Hindia-Belanda begitu lama ternyata adalah juga pemerintah yang telah memungkinkan lahirnya sebuah bangsa yang tidak diinginkan kemerdekaannya. Bahwa melalui monopoli dan organ pemaksa yang dimilikinya pemerintah kolonial Belanda kemudian dapat menetapkan batas teritorial, -yang juga merupakan batas dari monopoli “hak penggunaan kekerasan secara sah”, sehingga “siapapun yang berpotensi menggunakan kekuatan fisik -entah dari dalam atau luar wilayah yang terlibat- menyadari klaim itu dan oleh karenanya tidak melakukan tindakan yang dianggap tidak sah di wilayah bersangkutan” (hal. 70)- yang kemudian menjadi batas-batas negara yang akan lahir, Republik Indonesia.

Dalam hal ini pemerintah kolonial Belanda menghadapi dua masalah yang berbeda. Pertama adalah pengakuan dari dalam, dari suku-sukubangsa atau penguasa tradisional yang sudah ada lebih dulu di Indonesia, dan yang kedua adalah pengakuan dari luar, yaitu dari pemerintah lain yang sudah atau ingin mengklaim monopoli juga atas seluruh atau sebagian wilayah yang diklaim oleh Belanda. Masalah-masalah ini ternyata dapat diatasi oleh pemerintah kolonial Belanda, melalui penetapan hubungan kontrak dengan para penguasa tradisional di Hindia-Belanda, dan melalui penanda-tanganan pakta-pakta dengan beberapa negara Eropa Barat yang ingin berkuasa di Hindia-Belanda, yaitu Prancis, Inggris dan Portugis (hal. 71-75)

Penetapan batas teritorial yang berhasil dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda tentu tidak cukup menjadi faktor pembentuk bangsa Indonesia, karena sebuah bangsa utamanya bukan merupakan sebuah wilayah, tetapi sebuah kesatuan sosial dengan ciri-ciri tertentu. Salah satu faktor penting dalam proses pembentukan bangsa dalam wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Belanda adalah -lagi-lagi- sebuah sistem yang mereka bangun sendiri untuk melaksanakan penjajahan mereka, yaitu pendidikan untuk warga masyarakat pribumi di Hindia-Belanda.

Sistem yang pada awalnya sederhana ini mau tidak mau kemudian tumbuh dan berkembang semakin kompleks, karena adanya lulusan-lulusan dari pendidikan dasar yang kemudian memerlukan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan, sebelum itu upaya untuk memberikan pendidikan di tingkat yang paling dasar pun memerlukan orang-orang yang telah memiliki jenis pendidikan tertentu, yaitu para guru, yang tidak mungkin diatasi dengan mendatangkan guru dari negeri Belanda. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda kemudian juga mendirikan sekolah pendidikan guru (*Kweek-school*). Selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan berbagai sekolah lanjutan serta sekolah untuk kalangan atas dari warga pribumi Hindia-Belanda serta jenis-jenis sekolah yang lain seperti sekolah umum, sekolah vokasi dan sekolah profesi (hal. 98-116).

Meskipun tujuan utama dari pendidikan melalui sekolah-sekolah tersebut adalah memberikan pengetahuan-pengetahuan ilmiah, yang tidak dapat diperoleh melalui kehidupan sehari-hari para siswa dari lingkungan kesukuannya, namun melalui sekolah ini para siswa kemudian memperoleh sebuah kesadaran sosial baru juga, yang melampaui batas kesukuannya. Di situ mereka yang berasal dari berbagai suku bangsa di Hindia-Belanda itu “hidup selama beberapa tahun dalam satu lingkungan budaya asing yang membentuk pengalaman mereka yang oleh karenanya juga membentuk “persepsi mereka, sikap dan nilai secara baku” (hal. 117). Jumlah lulusan sekolah-sekolah ini semakin lama semakin besar dari tahun ke tahun.

Lantas, apa dampaknya? Sesuatu yang secara sosial-budaya tidak pernah diduga oleh pemerintah kolonial Belanda sendiri, yaitu semakin banyaknya “orang yang bisa melakukan pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas-aktivitas utama yang lebih tradisional”. Mereka akan masuk bekerja dalam bidang-bidang yang baru, yang tanpa diduga “mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang mengajak mereka ke dalam

jaringan kolektivitas sosial yang saling tergantung, yang membentuk sistem sosial milik bangsa Indonesia yang baru itu”, tulis Harsja (hal. 203).

Singkatnya, sistem pendidikan untuk bumiputera telah melahirkan golongan sosial tertentu yang disebut Harsja “cendekiawan etnis modern”, yang di kemudian hari memainkan peran penting dalam penguatan organisasi negara. Golongan cendekiawan ini mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) dalam proses penguatan pembentukan bangsa Indonesia. Ketika “cendekiawan etnis modern” ini telah lahir, sosoknya sebagai golongan sosial menjadi semakin jelas ketika mereka kemudian masuk dalam kelompok-kelompok profesi yang sejalur dengan pendidikan mereka tersebut, seperti misalnya kelompok para dokter.

Dengan data sejarah yang rinci Harsja memaparkan bagaimana generasi muda yang telah mengenal pendidikan Belanda tersebut kemudian membentuk perkumpulan-perkumpulan yang menunjukkan kehadiran mereka sebagai kelompok sosial baru dengan status sosial yang baru pula, dalam struktur masyarakat Hindia-Belanda di masa itu. Berbagai perkumpulan yang dibentuk atas dasar kesamaan sukubangsa mulai bermunculan, dimulai oleh perkumpulan cendekiawan Jawa, Boedi Oetomo, di tahun 1908. Kebangkitan cendekiawan etnis dengan pendidikan modern ini di mata Harsja merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembentukan bangsa Indonesia, karena dari sinilah kemudian lahir kolektivitas yang lebih penting lagi perannya, yaitu “kolektivitas supra-etnik”.

Menurut Harsja kolektivitas ini -yaitu kelompok-kelompok, satuan-satuan sosial yang pembentukannya tidak lagi didasarkan pada kesamaan etnis atau sukubangsa, tetapi pada kesamaan yang lain, seperti agama, profesi- merupakan inti dari proses pembentukan kesadaran nasional Indonesia dan bangsa Indonesia. Agama merupakan salah satu unsur pemersatu supra-etnik yang sangat penting dalam proses tersebut, kata Harsja, karena kepercayaan dan ajaran sebuah agama memungkinkan “individu-individu dari suku-suku bangsa yang berbeda..mengidentifikasi diri sebagai anggota dari kolektivitas yang sama, komunitas religius yang sama, walaupun bahasa mereka berbeda” (hal. 136). Agama Islam, Kristen, Katholik, kemudian melahirkan banyak asosiasi sukarela (*voluntary associations*). Berbagai perkumpulan yang dibuat oleh warga pribumi Hindia-Belanda ini telah berperan penting dalam membentuk sebuah orientasi sosial baru, orientasi yang nasional Indonesia (p. 136)

### **(b) Teori Harsja tentang “Ekspansi (Peluasan) Bangsa Indonesia”**

Ketika benih “bangsa Indonesia” telah muncul dan disemai, proses penting berikutnya adalah ekspansinya, yaitu berkembang dan menyebarnya benih kesadaran kebangsaan itu di kalangan ribuan kolektivitas yang tinggal di ribuan pulau di kawasan Hindia-Belanda; sebuah proses yang membuat kesadaran tersebut hadir tidak hanya di kalangan warga kota-kota besar Hindia-Belanda, tetapi juga ke pelosok-pelosok yang lebih jauh di pedalaman. Pada beberapa bangsa, proses ekspansi ini mungkin tidak dianggap sangat penting, karena bangsa tersebut relatif homogen pada komponen-komponen sosial pembentuknya. Namun,

tidak demikian halnya dengan Indonesia, dan -dalam pandangan Harsja- proses inilah yang banyak dilupakan oleh mereka yang mempelajari sejarah masyarakat Indonesia di masa lalu.

Ekspansi kebangsaan Indonesia itu menurut Harsja dimungkinkan oleh karena terjadinya empat hal, yaitu 1) ekspansi sistem pendidikan non-pribumi; 2) perekrutan anggota baru oleh kolektivitas Indonesia; 3) munculnya “satu pers Indonesia”, “satu publik Indonesia”; dan 4) terbentuknya “ekonomi Indonesia”. Ekspansi sistem pendidikan yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, atau sistem pendidikan Hindia-Belanda telah membantu terjadinya ekspansi gagasan kebangsaan Indonesia, karena semakin banyak lulusan yang dihasilkan oleh berbagai jenis sekolah yang ada di kala itu. Hasil pendidikan tersebut, “terutama kemampuan menulis dan membaca huruf Latin, memungkinkan cendekiawan Indonesia mengkomunikasikan gagasan pembaruan dan menanamkan gagasan bahwa mereka adalah bagian dari satu bangsa tunggal, yang membentang melampaui batas-batas masyarakat etniknya” (hal. 202).

Proses lain yang membantu meluasnya gagasan kebangsaan Indonesia adalah perekrutan anggota baru oleh kolektivitas Indonesia, yaitu satuan-satuan sosial yang dasar pembentukannya bukan lagi kesamaan suku bangsa, agama atau tempat tinggal, tetapi orientasi keindonesiaan. Dimensi keindonesiaan pada kolektivitas ini tercermin jelas pada nama-namanya, yang menggunakan kata “Indonesia” di dalamnya, seperti misalnya Perserikatan Nasional Indonesia (yang tumbuh dari sebuah kelompok studi di Bandung, *Algemeene Studieclub*), Persatoean Bangsa Indonesia (PBI), Partai Rakjat Indonesia, Partai Indonesia (Partindo), Partai Indonesia Raja (Parindra), Gerakan Rakjat Indonesia (Gerindo), dan masih banyak lagi yang lain.

Ketika itu, jenis organisasi keindonesiaan yang terbesar antara lain adalah Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia (yang kemudian menjadi Partai Indonesia dan berubah lagi menjadi Gerakan Rakyat Indonesia), dan Persatoean Bangsa Indonesia, yang kemudian bergabung dengan Boedi Oetomo menjadi Partai Indonesia Raya. Wujud ekspansi yang sangat jelas dari ide keindonesiaan ini adalah terbentuknya Permoefakatan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, sebuah federasi yang mewadahi berbagai organisasi sosial dan politik berbasis kesukuan, keagamaan dan kedaerahan, seperti Partai Sarekat Islam, Boedi Oetomo (Jawa), Pasoendan (Sunda), Sarekat Soematra (Sumatera), Kaoem Betawi (Jakarta), Sarekat Madura (Madura), Sarekat Ambon (Ambon), Verbond Timor (Timor), Partai Sarekat Selebes (Sulawesi), dan sebagainya (hal. 212). Ketika federasi ini mati, muncul GAPI (Gaboengan Politik Indonesia) sebagai gantinya, yang di dalamnya melebur Parindra, Gerindo, Pagoejoeban Pasoendan (Sunda), Persatoean Minahasa (Minahasa), PSII (Islam) dan Partai Islam Indonesia (PII) (hal. 213).

Dalam analisis tersebut terlihat jelas perspektif sosiologis Harsja. Beliau menggunakan istilah “kolektivitas Indonesia” dengan partai politik sebagai contohnya, sementara kebanyakan ilmuwan sosial tidak menggunakan konsep tersebut, dan lebih suka langsung menggunakan konsep partai politik atau organisasi massa. Melalui konsep kolektivitas Indonesia Harsja ingin menunjukkan dimensi keindonesiaan, dimensi kesadaran sosial

Indonesia, yang melandasi kelahiran dan mendahului tujuan-tujuan politik partai-partai tersebut. Demikian juga istilah “kolektivitas supra-etnik”, yang digunakan oleh Harsja untuk menegaskan perbedaan kolektivitas ini dengan kolektivitas yang berbasis pada kesamaan suku bangsa (etnik).

Uraian Harsja mengenai proses ekspansi keindonesiaan ini menurut saya sangat menarik dan terasa baru karena Harsja mampu menampilkan individu-individu yang terlibat dalam pembentukan kolektivitas tersebut beserta latarbelakang kesukuan mereka, sehingga kita memperoleh gambaran yang begitu jelas dari proses melemahnya etnisitas pada kategori sosial ”cendekiawan etnis modern” ketika menjadi “kolektivitas supra-etnik”, karena kesadaran keindonesiaan mereka yang semakin menguat. Dengan sengaja dan sangat sadar Harsja menulis seperti ini: “pengacara Jawa R.Ng.Soebroto”, “orang Melayu Joesoef”, “orang Manado Salem Ngi-on”, “orang Ambon J.P.Tuwanakotta”, “orang Madura R.Rooslan Wongsokoesoemo”, “seorang wartawan asal Madura, Mohammad Tabrani”, “orang Minangkabau Kasoema gelar Soetan Pamoentjak”, “orang Minangkabau Maas”, “pengacara Minangkabau Moh. Yamin”, “orang Mandailing Amir Sjarifoedin” dan masih banyak lagi. Strategi penyajian seperti ini sangat jarang -bahkan setahu saya belum pernah ada- dalam penulisan sejarah Indonesia atau organisasi-organisasi sosial-politik di Hindia-Belanda, atau kalau toh ada tujuan penulisannya berbeda dengan tujuan Harsja. Di sinilah terletak salah satu kelebihan paparan Harsja. Sebagai warga bangsa Indonesia yang tumbuh dewasa di era revolusi, tentu cukup mudah bagi beliau mengenali nama-nama orang Indonesia tersebut dan sukubangsa mereka dan -lebih penting lagi-, kemudian menyajikannya dalam disertasinya; sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh peneliti asing tentang Indonesia -yang umumnya tidak sangat tahu latar-belakang etnis tokoh-tokoh Indonesia yang mereka kenal dan temui-, maupun oleh peneliti Indonesia sendiri -yang mungkin tidak terlalu menyadari pentingnya informasi kesukubangsaan itu disajikan- ketika menulis sejarah terbentuknya bangsa Indonesia.

Proses lain yang sangat penting adalah munculnya pers Indonesia. Sulit dibayangkan saya kira bahwa ekspansi keindonesiaan dapat berlangsung dengan cukup cepat di masa itu tanpa kehadiran pers Hindia-Belanda, yaitu kantor-kantor berita dan percetakannya, yang memungkinkan ide-ide inovatif para cendekiawan kemudian dicetak, diperbanyak dan disebarkan ke khalayak yang lebih luas melalui surat kabar (hal. 214). Salah satu ciri penting pers Indonesia ini di kala itu adalah bahasa Melayunya.

Yang menarik di sini adalah fakta bahwa benih pers Indonesia ini muncul dari seorang pengusaha Cina, yang berupaya memberikan informasi kepada para anggota komunitas Cina yang bekerja sebagai pedagang, sehingga isinya ketika itu terutama adalah iklan dan informasi lokal. Surat kabar pertama yang terbit untuk melayani publik Cina ini terbit di Surabaya pada akhir abad 19 -dengan nama *Bintang Soerabaja*-, menggunakan bahasa Melayu dan huruf Latin, sehingga surat kabar ini tidak hanya melayani orang Cina, tetapi juga melayani publik pribumi yang berpendidikan. Di Jakarta, surat kabar seperti ini terbit pada tahun 1902 dengan nama *Bintang Betawi* yang dipimpin oleh seorang jurnalis Belanda

(hal. 215). Jumlah surat kabar ini bertambah banyak, sehingga pada tahun 1920an, hampir di setiap kota besar di Hindia-Belanda dapat ditemukan satu atau lebih surat kabar lokal. Di Medan ada *Pewartar Deli*, di Jakarta ada *Bintang Timoer*, *Tjaja Timoer*, *Revue Politik*, dan *Menara*, di Surakarta ada *Adil*, di Semarang ada *Bahagia* dan *Daja Oepaja* (hal. 217).

Dalam hubungannya dengan kesadaran keindonesiaan, pers di masa Hindia Belanda tersebut memiliki beberapa fungsi penting. Di antaranya adalah, pertama, fungsi kebahasaan, yaitu mentransformasi penggunaan versi-versi bahasa Melayu lokal yang beragam menjadi satu bahasa Indonesia yang standar (p. 217). Kedua, penyatuan atau penyamaan informasi dan gagasan, karena melalui surat kabar tersebut para cendekiawan pribumi modern yang berada di berbagai tempat dan komunitas “memperoleh satu kumpulan informasi umum yang bisa menjadi referensi yang berguna dalam komunikasi” antaretnis. Ketiga, memperkenalkan kepada pembacanya “para pemimpin yang mulai muncul dari bangsa itu”, serta “menanamkan minat berkelanjutan terhadap gagasan dan aktivitas para pemimpin itu”. Keempat, memperkenalkan nilai-nilai baru supra-etnis kepada para pembaca, dan menawarkannya sebagai alternatif dari nilai-nilai kesukuan yang sudah lebih dulu ada (hal. 218).

Harus diakui bahwa di antara surat kabar yang diterbitkan oleh berbagai kolektivitas tersebut terdapat perbedaan kepentingan dan persaingan, akan tetapi sulit dipungkiri juga bahwa surat kabar-surat kabar tersebut -menurut Harsja- juga merupakan “perwujudan dari satu pers Indonesia yang khas, yang memiliki satu sistem simbol bersama yang tidak dapat dihubungkan dengan simbol suku bangsa pribumi lama manapun di Indonesia” (hal. 222). Oleh karena itu, Harsja menyimpulkan bahwa, pers Indonesia -mungkin lebih tepatnya pers Hindia-Belanda- telah “turut ambil bagian dalam pemupukan motivasi yang pada gilirannya membuat para pembacanya, yang secara etnis berbeda-beda itu, berkomitmen kepada bangsa Indonesia baru” (hal. 222)

Pendapat Harsja mengenai hubungan antara pers dengan ekspansi gagasan keindonesiaan itu mengingatkan kita pada teori Benedict Anderson (1983) -yang muncul sepuluh tahun setelah disertasi Harsja- mengenai bangsa sebagai sebuah komunitas imajiner atau komunitas yang dibayangkan (*imagined community*). Anderson mengatakan bahwa surat kabar dengan bahasa “daerah” di Eropa di masa lalu -seperti bahasa Belanda, Prancis, Jerman, dan sebagainya- telah memainkan peran penting dalam menyebarkan ide-ide kebangsaan di kalangan pengguna bahasa daerah tersebut.

Proses penting berikutnya yang mendorong lahirnya bangsa Indonesia adalah terbentuknya “ekonomi Indonesia”. Dalam upaya melakukan eksploitasi politik dan ekonomi, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan satu sistem moneter, menerapkan kebijakan fiskal yang berlaku di daerah taklukannya, dengan cara “menentukan dan menaikkan pajak tidak langsung”. Sistem ekonomi kolonial ini telah “mendorong sebagian besar penduduk ke dalam satu sistem ekonomi yang jauh melampaui rumah-tangga, komunitas lokal, dan wilayah mereka masing-masing”, sehingga mereka lantas “tergantung pada sistem ekonomi tersebut” (hal. 222). Di situ “buruh pribumi dari berbagai suku bangsa harus bekerja

bersama-sama untuk memperoleh pekerjaan yang secara eksklusif dicadangkan untuk orang Eropa dan orang dekatnya, orang Indo-Eropa”. Perjuangan ini “memotivasi orang-orang dari sukubangsa berbeda-beda untuk mengembangkan kedekatan dan untuk berpartisipasi dalam aksi bersama untuk memperjuangkan kepentingan bersama”, yaitu mencapai “standar kehidupan yang lebih tinggi” (hal. 222).

Sistem ekonomi kolonial berupa pembukaan perkebunan dan pertambangan di berbagai tempat yang langka tenaga kerja telah memperluas dan mengintensifkan migrasi penduduk dalam jumlah yang “tak terbayangkan” di masa itu (hal. 223). Di sini Harsja menyajikan angka-angka statistik pemerintah kolonial yang rinci untuk mendukung pendapat beliau, seperti misalnya jumlah orang Jawa yang tersebar di berbagai daerah di Hindia-Belanda, jumlah orang Madura yang tinggal di luar pulau Madura, jumlah orang Sunda yang tinggal di luar Jawa Barat, jumlah orang Minangkabau di luar tempat kelahirannya, jumlah orang Bugis di berbagai tempat seperti Kalimantan, Sumatra, Manado, Bali, Lombok dan sebagainya (hal. 223-224).

Lebih lanjut, sistem ekonomi kolonial juga telah membuat sebagian penduduk pribumi Hindia-Belanda “semakin tergantung pada pemakaian mata uang...yang juga dimanfaatkan oleh semakin banyak orang dari suku bangsa yang lain” (hal. 227). Struktur pekerjaan dalam sistem ekonomi itu juga telah menghasilkan suatu sistem stratifikasi sosial baru yang tidak lagi didasarkan pada nilai dan norma suku bangsa lama, tetapi pada sistem budaya sebuah bangsa di Hindia-Belanda, yang kemudian menjadi bangsa Indonesia. Di sini berbagai warga suku bangsa lama dapat membentuk suatu kelompok solidaritas yang berbeda dengan kelompok lainnya, karena solidaritas etnis tidak lagi menjadi sangat penting.

Yang menarik dari analisis Harsja di sini adalah bahwa pembentukan bangsa (*nation building*) dan sistem ekonomi tidak beliau pandang hanya sebagai sistem keuangan atau matapencaharian, tetapi juga sebagai sebuah sistem budaya yang mengandung nilai-nilai tertentu yang membuat mereka yang terlibat dalam sistem itu merasa dalam satu ikatan sosial-budaya tertentu, memiliki solidaritas tertentu. Cara pandang seperti ini sangat jelas memperlihatkan jejak pemikiran Talcott Parsons di dalamnya.

### **(c) Teori Harsja tentang “Masalah Pembentukan Bangsa Indonesia” (sampai tahun 1950an)**

Harsja menulis disertasinya di tahun 1970an, ketika Indonesia telah merdeka dan boleh dikatakan telah melampaui masa-masa kritisnya. Meskipun demikian, beliau berpendapat bahwa “proses pembentukan bangsa Indonesia belum lagi selesai” (hal. 235). Masih ada sejumlah persoalan penting yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia, jika memang warga bangsa ini tetap ingin bersatu di bawah nama “bangsa Indonesia”. Secara eksplisit Harsja menyebut ada lima masalah, tetapi secara implisit ada enam. Apa saja itu?

Pertama, “banyak individu yang menurut hukum dianggap sebagai warga negara Indonesia belum masuk sebagai bangsa Indonesia yang baru terbentuk itu”, seperti misalnya komunitas-komunitas kecil dan sederhana di daerah pedalaman karena “mereka belum

menjalin komunikasi dengan mereka yang sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia”, akibatnya “tidak akan ada solidaritas, apalagi kesetiaan prioritas tinggi yang bisa berkembang” di kalangan mereka terhadap kolektivitas yang bernama bangsa Indonesia. Variasi partisipasi warga suku-suku bangsa lama dalam aktivitas bangsa Indonesia menurut Harsja adalah “bagian dari apa yang biasanya disebut sebagai “regionalisme” atau “provinsialisme” (hal. 236-237)

Kedua adalah masalah “sistem budaya bangsa”. Di mata Harsja, bangsa Indonesia masih memerlukan adanya nilai-nilai yang dapat “dipakai sebagai pedoman dalam situasi-situasi sosial tertentu”, nilai-nilai ini ternyata “masih harus diformulasikan”. (hal. 238). Ketiadaan nilai-nilai ini membuat interaksi sosial di kalangan warga bangsa Indonesia untuk membangun sebuah gagasan keindonesiaan yang sama menjadi lebih sulit dan lebih lama.

Ketiga adalah masalah pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Institusi pendidikan tinggi yang berkualitas semuanya terdapat di Jawa, dan sayangnya lulusan universitas-universitas ini -yang berasal dari berbagai suku bangsa non-Jawa, namun “telah berorientasi Indonesia, atau menjadi anggota bangsa Indonesia”- “tidak lalu menyebar ke wilayah-wilayah di luar Jawa untuk memperkuat komponen cendekiawan Indonesia dari berbagai suku bangsa lama” (hal.240). Sebaliknya, di berbagai universitas yang didirikan di luar Jawa pada tahun 1950an -Harsja menyebutnya “universitas provinsi”-, badan mahasiswa dan staf pengajar di situ secara etnis relatif homogen, sehingga sulit diharapkan bahwa universitas-universitas ini nantinya akan “bisa menanamkan satu orientasi Indonesia sejati” di kalangan civitas akademiknya (hal. 240). Dengan kata lain, persebaran lulusan perguruan tinggi yang masih memusat di beberapa tempat membuat pendidikan kurang besar sumbangannya terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia.

Keempat adalah asosiasi sukarela yang berorientasi etnis masih ada di kota-kota besar, termasuk Jakarta”. Kecenderungan dari banyak suku bangsa ketika itu adalah mendirikan asosiasi solidaritas etnis mereka sendiri-sendiri, yang sadar atau tidak tujuannya adalah menjaga “putra-putri daerah mereka masing-masing tetap berada dalam lingkaran kekerabatan” (hal. 241). Kecenderungan seperti ini dalam pandangan Harsja telah membuat proses ekspansi gagasan dan semangat keindonesiaan dalam asosiasi sukarela tersebut menjadi lambat.

Kelima adalah masalah “distribusi kekuasaan dan otoritas”, yang tercermin dalam perdebatan untuk memilih bentuk kenegaraan: negara kesatuan atau negara federal. Menurut Harsja, jika kita melihat persoalan ini dari perspektif pembentukan bangsa Indonesia, maka “negara kesatuan menawarkan satu kondisi lebih baik untuk pengembangan bangsa Indonesia baru, sementara jika dilihat dari dimensi waktu, maka “bentuk negara federal cenderung memperkuat suku-suku bangsa lama” (hal. 242).

Keenam adalah masalah ekonomi, yaitu kesenjangan ekonomi di antara suku-suku bangsa di Indonesia, yang berpengaruh terhadap hubungan mereka satu sama lain. Mengenai hal ini, Harsja tidak membahasnya secara mendalam, karena beliau tampaknya menganggap masalah ini bukan lagi masalah sosiologi. Meskipun demikian, bagi beliau masalah-masalah

tersebut tetap merupakan “masalah mendasar yang harus diperhatikan oleh pendukung pembentukan bangsa Indonesia, jika mereka tidak ingin bangsa itu hancur” (hal. 243).

Berkenaan dengan masalah-masalah tersebut, Harsja tidak menawarkan cara-cara penyelesaian yang dapat ditempuh oleh bangsa Indonesia secara bersama, ataupun oleh para pemimpin bangsa yang lebih berwenang melakukannya. Namun, beliau menyampaikan sebuah kritik -jika bukan sebuah pendapat- umum terhadap apa yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Menurut beliau, terlihat cukup jelas pemikiran-pemikiran yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah, namun kemudian cenderung “menjadi etnosentris dalam pemilihan ide” (hal. 239). Orang Jawa misalnya, karena secara demografis jumlah mereka adalah yang terbesar, seringkali tanpa sadar menawarkan atau menggunakan model-model, konsep-konsep, nilai-nilai, dari jagad budaya Jawa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat nasional Indonesia. Tidak mengherankan jika di masa Orde Baru mereka yang berasal bukan dari budaya Jawa sering berpendapat bahwa Indonesia sedang mengalami proses Jawanisasi.

#### **4. SOSIOLOGI HISTORIS (*HISTORICAL SOCIOLOGY*)**

Teori-teori dari Harsja Bachtiar di atas merupakan kelebihan-kelebihan yang dapat kita temukan dalam pemikiran Harsja. Namun demikian, kajian sejarah atas sebuah bangsa tentu tidak cukup dinilai dari aspek teoretisnya saja, karena kajian tersebut juga sangat menekankan kekhususan, keunikan peristiwa yang dideskripsikannya. Hal ini berarti bahwa penilaian perlu diberikan juga pada kualitas informasi di dalamnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, kajian Harsja terlihat jelas memberikan banyak informasi yang rinci tentang berbagai hal penting mengenai situasi dan kondisi masyarakat Indonesia di masa itu. Melalui perspektif sejarah Harsja menunjukkan bahwa berbagai faktor sosial-politik-budaya di atas tidak muncul dan memberikan pengaruh secara bersamaan. Kehadiran pemerintah kolonial Belanda sebagai organ pemaksa misalnya, merupakan faktor yang paling awal, karena pemerintah kolonial inilah yang dapat menetapkan pemaksaan melalui organ militernya, dan mempunyai kekuatan untuk menetapkan batas-batas teritorial, batas geografis dengan entitas politik lain, negara lain, serta hubungan kekuasaan tertentu dengan entitas politik lokal di dalam negeri. Akan tetapi, proses penguatan organisasi negara itu juga tidak dapat berlangsung tanpa bekerjanya unsur-unsur lain di dalam organisasi tersebut.

Dengan teliti Harsja menelusuri proses tersebut melalui data sejarah yang berhasil didapatkannya dan kemudian menyajikannya secara kronologis dan sistematis. Di sini terlihat jelas betapa tekun Harsja Bachtiar mengumpulkan data sejarah dan kemudian menyajikannya sebagai proses lewat narasi historisnya. Data sejarah yang menurut saya sangat menarik dan berharga adalah data statistik mengenai jumlah sekolah HIS dan murid-murid pribumi dan non-pribumi di dalamnya (hal. 93), jumlah penduduk pribumi yang mendapat pendidikan sekolah dasar (hal. 94-95); jumlah murid pribumi dan Eropa di sekolah dasar dan sekolah tinggi (hal. 113; 115); jumlah penduduk pribumi yang bekerja di berbagai sektor pekerjaan

di Hindia-Belanda (hal. 224-226), dan jumlah suku bangsa di Indonesia (hal. 237-238). Jika dianalisis dan ditafsir lebih lanjut -tidak hanya dengan memperhatikan jumlahnya saja-, banyak yang dapat diungkap dari data tersebut tentang situasi dan kondisi sosial-budaya masyarakat bumiputera di Hindia-Belanda di masa penjajahan, serta dinamika perubahannya.

Dalam telaahnya Harsja memandang bangsa Indonesia sebagai sebuah kolektivitas yang terdiri dari kolektivitas-kolektivitas yang lebih kecil, dan kolektivitas-kolektivitas tersebut merupakan kumpulan individu-individu yang berperilaku, bertindak serta berinteraksi sosial dengan pola-pola tertentu. Oleh karena itu, deskripsi tentang proses terbentuknya bangsa Indonesia tidak pernah bisa lepas dari deskripsi mengenai berbagai pola perilaku, tindakan dan interaksi sosial individu-individu dan kolektivitas-kolektivitas tersebut. Di sinilah terlihat kajian Harsja telah melampaui batas disiplin ilmu beliau sendiri, sosiologi, yang seringkali dipertahankan dan dijaga dengan ketat oleh sejumlah ahli sosiologi yang lain. Studi Harsja menurut saya termasuk telaah sosiologi dengan genre *historical sociology* (sosiologi historis; sosiologi yang menyejarah).

Dalam genre itu, ahli sosiologi tidak lagi membedakan dirinya dengan ahli sejarah sosial, karena objek kajian keduanya pada dasarnya adalah sama, yaitu masyarakat. Sosiologi yang historis adalah *“the attempt to understand the relationship of personal activity and experience on the one hand and social organisation on the other as something that is continuously constructed in time. It makes the continuous process of construction the focal concern of the analysis. The process may be studied in many different contexts: in personal biographies or careers; in the rise and fall of whole civilisations; in the setting of particular events.....or of particular developments such as the making of the welfare state or the formation of the working class”* (Abrams, 1982: 16-17). Dalam konteks ini apa yang dilakukan oleh Harsja adalah mencoba menunjukkan interaksi berbagai individu-individu atau tokoh sejarah -sebagaimana terlihat pada nama dan kedudukan mereka dalam peristiwa sejarah- dengan organisasi sosial dan struktur sosial tempat mereka berada dalam masyarakat Hindia-Belanda.

Dengan kata lain, Harsja telah melakukan dua cara kerja keilmuan, yaitu cara kerja sosiologis dan cara kerja historis. Sosiologi Historis yang dikerjakan oleh Harsja adalah menelaah dan memaparkan, mendeskripsikan suatu peristiwa atau gejala sosial-budaya dengan menggunakan kerangka berfikir sosiologi dan sejarah untuk mengumpulkan data, memahaminya dan menganalisisnya. Dalam praktek keilmuan, keduanya tidak selalu mudah dilakukan, karena masing-masing menekankan aspek yang berbeda. Studi *historical sociology* lebih menekankan pada aspek historisnya, untuk membedakannya dengan kajian sosiologis yang lain, yang tidak historis.

Dari sisi yang lain, kajian Harsja juga dapat disebut sebagai sejarah sosiologis, yakni kajian sejarah dengan memanfaatkan konsep dan teori dalam sosiologi untuk menjelaskan peristiwa sosial yang terjadi di masa lampau, dan menyajikannya dalam bentuk historiografi yang menempatkan gejala atau peristiwa dalam rantai hubungan sebab-akibat (kausal-eksplanatif). Historiografi semacam ini sangat terlihat pada paparan Harsja. Kajian

*sociological history* oleh Harsja merupakan kajian sejarah yang menekankan pada relasi-relasi antarindividu dan kolektivitas, dan ini membedakannya dengan kajian historis yang memperhatikan aspek lain dari masyarakat, seperti *economic history*, *political history*, dan sebagainya.

Dalam konteks wacana ilmu sosial di Indonesia hasil kajian Harsja sangat penting karena, pertama, topiknya jarang mendapat perhatian ilmuwan politik dan sejarawan Indonesia. Apalagi dari ilmuwan sosial lainnya. Kedua, datanya mengenai hal-hal yang juga jarang diperhatikan ilmuwan sosial Indonesia, seperti misalnya relasi sistem pendidikan di era kolonial dengan pembentukan asosiasi sukarela regional dan etnis, sumbangannya untuk munculnya kesadaran nasional, serta pengaruhnya terhadap kelahiran elit baru Indonesia; peran pers Indonesia dalam pembentukan publik pembaca yang semakin sadar akan kebangsaannya, dan sebagainya. Ketiga diskusi teoretis Harsja mengenai konsep “bangsa”, “negara”, serta telaahnya atas berbagai silang pendapat di kalangan ilmuwan sosial tentang hal-hal lainnya merupakan hal yang sangat jarang kita jumpai dalam buku-buku ilmu sosial di Indonesia. Membaca uraian Harsja tentang hal-hal tersebut terasa sangat membuka wawasan kita mengenai berbagai masalah sosial, politik dan kebudayaan di Indonesia.

## **5. KRITIK**

Terlepas dari sejumlah kelebihanannya, beberapa kekurangan dapat kita temukan dalam kajian Harsja. Pertama, Harsja memaparkan dengan baik tentang pers Hindia-Belanda dan fungsinya terhadap ekspansi keindonesiaan, akan tetapi beliau sama sekali tidak membahas tentang peran radio di situ, padahal peran radio jelas sangat penting di masa itu. Informasi melalui radio jauh lebih cepat menjangkau masyarakat luas daripada melalui media cetak. Kehadiran radio di situ juga merupakan sebuah revolusi komunikasi di Indonesia, karena setelah hadirnya radio, berita dari surat kabar sering terasa sudah basi ketika tiba di tangan pembacanya. Jika menurut Harsja surat kabar memiliki peran penting dalam pembentukan kesadaran kebangsaan Indonesia, radio saya kira tidak kalah pentingnya, jika tidak malah lebih penting. Proklamasi kemerdekaan misalnya, bisa segera diketahui oleh masyarakat Indonesia tidak lain karena pembacaannya yang disiarkan melalui radio ke seluruh Indonesia. Kesadaran kolektif tentang bangsa Indonesia yang merdeka serta-merta terbentuk setelah orang mendengar pembacaan teks proklamasi oleh Bung Karno melalui radio. Semangat untuk berjuang tidak akan menggelora jika orang hanya membaca teks surat kabar. Pidato Bung Karno dan Bung Tomo dengan suara lantang, yang disiarkan melalui radiolah yang mampu mengobarkan semangat rakyat Indonesia untuk melawan tentara Sekutu dan Belanda yang ingin menjajah kembali. Seandainya saja Harsja tidak melupakan radio sebagai media komunikasi yang baru dalam masyarakat Hindia-Belanda, hasil kajiannya tentu akan terasa lebih meyakinkan lagi.

Kedua, Harsja lupa memperhatikan dimensi material, infrastruktural dari proses pembentukan bangsa Indonesia. Meskipun beliau menyajikan data statistik warga pribumi yang bekerja di sektor transportasi, tetapi beliau lupa memperhatikan perkembangan

pembangunan sarana dan prasarana perhubungan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang merupakan sarana utama penjalin kontak, interaksi dan komunikasi di antara warga berbagai sukubangsa di Hindia-Belanda, yang kemudian melahirkan kesadaran tentang kebangsaan Indonesia. Perkembangan transportasi antarpulau di Hindia Belanda ketika itu tentu telah mendorong semakin derasnya arus migrasi antar-pulau dan meningkatnya frekuensi interaksi sosial antarwarga suku yang berbeda, yang semakin meluaskan kesadaran keindonesiaan yang sedang tumbuh.

Terakhir, Harsja kurang berhati-hati menggunakan kata “Indonesia” untuk wilayah Indonesia di tahun 1930an, karena di masa itu negara Indonesia belum ada. Gagasan tentang “Indonesia” masih sangat abstrak, dan belum menunjuk pada suatu kawasan geografis tertentu. Lebih tepat sebenarnya kalau Harsja menggunakan istilah “Hindia-Belanda” untuk menunjuk daerah jajahan Belanda itu.

Beberapa kekurangan di atas sebaiknya tidak membuat kita lantas mengabaikan kajian Harsja tersebut, tetapi dilihat sebagai peluang untuk melakukan kajian-kajian yang lebih teliti dan mendalam tentang topik yang kurang lebih sama. Kajian tentang proses pembentukan bangsa Indonesia selanjutnya dapat diarahkan misalnya pada peran partai politik, peran radio, peran televisi, peran saran dan prasarana transportasi, dan yang lain-lain dalam proses mewujudkan bangsa Indonesia menjadi sebuah komunitas yang terdiri dari ratusan suku bangsa dengan bahasa yang berbeda, dengan sejumlah variasi pola matapencaharian, dan menganut agama dan sistem kepercayaan yang beraneka-ragam pula.

## 6. PENUTUP

Dalam wacana ilmu sosial-budaya di Indonesia, sering sekali terdengar kritik -baik dari kalangan para ilmuwan sendiri ataupun dari kalangan awam- bahwa ilmuwan sosial-budaya Indonesia kurang mampu menghasilkan teori-teori dari penelitian mereka, baik itu yang di Indonesia maupun di tempat lain. Mereka dianggap lebih banyak mengutip pendapat ilmuwan asing daripada mengutip pendapat sesama ilmuwan sosial-budaya Indonesia sendiri. Mengenai ini saya tidak sependapat. Hasil pembacaan saya atas berbagai buku dan artikel jurnal ilmu sosial-budaya Indonesia menunjukkan bahwa ilmuwan sosial-budaya Indonesia telah menghasilkan teori-teori baru, namun umumnya baru berupa teori-teori kecil (*micro theories; small theories*).

Sehubungan dengan itu, sengaja saya menampilkan pemikiran sosiologis-historis Harsja Bachtiar -yang saya sebut sebagai “teori” mengenai “pembentukan bangsa Indonesia”-, agar publik pembaca mengetahui dan menyadari bahwa ilmuwan sosial Indonesia sebenarnya telah mampu membangun teori-teori mereka sendiri. Dengan begitu tidak akan muncul kritik bahwa mereka belum dapat menghasilkan teori-teori, dan pembaca juga tidak akan begitu saja mengamini kritik tersebut.

Saya khawatir kritik tersebut lebih disebabkan antara lain oleh ketidak-mampuan para pengkritik menemukan teori-teori tersebut dalam tulisan para ilmuwan sosial-budaya

Indonesia, -dan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka tentang apa yang dimaksud dengan “teori”-, atau karena keengganan mereka untuk mengakui, menerima kehadiran teori tersebut sebagai sebuah hal yang layak untuk dihargai, disyukuri dan diberi pujian.

Saya berharap kita sekarang lebih menyadari bahwa masalahnya tidak terletak pada ketidak-mampuan ilmuwan sosial Indonesia membangun teori, tetapi mungkin lebih pada kesediaan kalangan ilmuwan Indonesia sendiri untuk mengakui kehadiran dan kebenaran teori dari kolega mereka, dan kemudian dengan keikhlasan dan kerendahan hati bersedia menyebar-luaskan teori tersebut serta menyebut-nyebut atau memuji nama ilmunya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrams, P. (1982). *Historical Sociology*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Ahimsa-Putra, H.S. (2007). *Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan*. Makalah seminar. UPI Bandung.
- \_\_\_\_\_. (2018). *Integrasi Nasional dan Ancaman Yang Dihadapi*. Makalah “Koentjaraningrat Memorial Lecture”. Jakarta: FKAI
- \_\_\_\_\_. (2019). “Koentjaraningrat dan Integrasi Nasional Indonesia: Sebuah Telaah Kritis”. *Patrawidya 20 (2)*: 115-130.
- Anderson, B.O. 1991(1983). *Imagined Communities*. London: Verso.
- Bachtiar, H.W. (1974). *The Indonesian Nation: Some Problems of Integration and Disintegration. Southeast Asian Perspectives 2*. Singapore: ISEAS
- \_\_\_\_\_. (2019). *Pembentukan Bangsa Indonesia*. Draft buku. Jakarta: Kompas
- Jones, T. 2012. “Indonesian Cultural Policy in the Reform Era”. *Indonesia 93*: 147-176.
- Koentjaraningrat. 1963. “Kata Pengantar” dalam *Penduduk Irian Barat*, Koentjaraningrat dan H.W.Bachtiar (red.). Jakarta: Penerbitan Universitas.
- \_\_\_\_\_. (1982). “Lima Masalah Integrasi Nasional” dalam *Masalah-Masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*, Koentjaraningrat (peny.). Jakarta: LP3ES
- \_\_\_\_\_. (1993). *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: UI-Press.
- Lindsay, J. (2012). “Heirs to world culture 1950-1965: An Introduction” dalam *Heirs to World Culture: Being Indonesian, 1950-1965*, J.Lindsay and M.H.T.Liem (eds.). Leiden: Brill.
- Lipset, S.M. dan R.B.Dobson. (1972). “The intellectuals as critics and rebels: with reference to the United States and the Soviet Union”. *Daedalus CI (3)*: 137-198.
- Marshall, T.H. (2009) . “Citizenship and Social Class” dalam *Inequality and Society*, J.Manza and M.Sauder (eds.) . New York: W.W.Norton and Co.

- Meuleman, J. (2006). "Between Unity and Diversity: The Construction of the Indonesian Nation". *European Journal of East Asian Studies* 5 (1): 45-69.
- Parsons, T. (1968). "On the concept of value commitments". *Sociological Inquiry* 38 (2): 135-160.
- Schefold, R. (1998). "The Domestication of Culture: Nation Building and Ethnic Diversity in Indonesia". *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde* 154 (2): 259-280.
- Weber, M. (1947). *The Theory of Economic and Social Organization*. Disunting dengan "Pengantar" oleh T. Parsons. New York: Oxford University Press.